

## **STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL DALAM KAJIAN VARIASI KERUANGAN**

*Oleh:*

*Nurhadi*

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*

*Sehubungan dengan perumusan strategi pembangunan, maka perdebatan utama yang muncul, khususnya pada saat-saat awal perencanaan pembangunan berkisar pada persoalan apakah prioritas diberikan untuk pengembangan pertanian atau pengembangan industri. Dalam kaitan ini, Forbes (1986: 65) mengemukakan, ilmu ekonomi yang muncul dalam tahun 1950-an dan tahun 1960-an pada dasarnya memusatkan perhatian pada kebutuhan untuk memindahkan negara-negara dengan basis pertanian yang rendah produktivitasnya ke basis industri yang tinggi produktivitasnya. Diantara contoh-contoh yang paling menonjol dari teori modernisasi difusionis ini adalah model “pusat pinggiran” (core-periphery) dari Pebrisch (1949) yang dikembangkan kemudian oleh Friedman (1969) menjadi “teori pembangunan regional”; konsep “kutub pertumbuhan” (growth poles), dari Perroyx (1950) dan “pusat pertumbuhan” (growth centres) dari Boudeville; serta geografi dari madzhab modernisasi yang dipimpin oleh Soja (1968), Gould (1970), Ridel (1970) dan Berry (1972). Banyak perencanaan yang pada mulanya tidak bersifat keruangan dan tidak memperhitungkan lokasi pengembangan yang menjadi sasaran proyek. Keadaan ini akan meningkatkan atau mengintensifkan pola inti-pinggiran (core-periphery), dalam suatu negara, sehingga keuntungan pembangunan cenderung terpusat pada suatu “wilayah” dari pada menyebar. Adapun wilayah yang dimaksudkan disini adalah pedesaan dan perkotaan. Variasi keruangan didalam pembangunan, menyangkut dua konsep utama, yaitu konsep pusat – pinggiran (core-periphery) dan konsep kutub pertumbuhan-pusat pertumbuhan (Growth pole-Growth centres). Dusseldorp menawarkan dua cara dari atas kebawah top down approach) yaitu perencanaan nasional memberikan petunjuk berapa besar keuangan yang disediakan untuk daerah; kemudian dilakukan dari bawah keatas (botton up approuch) yang dimulai dari perencanaan wilayah taraf terendah dan berakhir dengan perencanaan nasional. Forbes dengan konsep “kutub pertumbuhan” merupakan konsep berpengaruh satu-satunya mengenai “pembangunan regional”, sedangkan Konsep Agropolitan dengan menggunakan prinsip desentralisasi dan mengikut sertakan sebagian besar penduduk disuatu wilayah, yaitu penduduk pedesaan yang bertani dalam pembangunan. Sesuai konsep ini, pedesaan yang tadinya tertutup, diusahakan supaya lebih terbuka.*

## A. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yakni: “rencana” yang terkait dengan ekonomi sebagai suatu keseluruhan dibagi dalam sector-sector utama (perencanaan sektoral) dan dapat terjadi dalam wilayah-wilayah (perencanaan regional); dan “program” yang terkait dengan penentuan secara lebih detail yaitu berupa tujuan-tujuan khusus yang harus dicapai dalam berbagai sector atau wilayah; dan “proyek” merupakan komponen-komponen individual yang dapat bersama-sama menjadikan suatu program.

Perumusan setiap strategi pembangunan harus mempertimbangkan sejumlah kondisi dasar. Tahapan pengembangan jelas sangat penting artinya. Di negara-negara yang sangat miskin yang sangat bergantung kepada pertanian untuk mencukupi kebutuhan sendiri dengan ekonomi uang yang belum begitu berkembang/dikembangkan dan sumber-sumber alam atau keuangannya terbatas, kecil kemungkinan untuk dapat merumuskan rencana multisektoral yang kompleks. Sebaliknya bagi negara-negara yang kaya dan makmur dengan perdagangan yang berkembang baik ekonomi, pertanian dan pertambangan, mungkin dapat diharapkan untuk memulai perubahan pada industrialisasi dengan mengembangkan ketrampilan-ketrampilan serta sumber-sumber yang diperlukan untuk realisasinya. (Dickenson, cs, 1992: 288).

Sehubungan dengan perumusan strategi pembangunan tersebut, maka perdebatan utama yang muncul, khususnya pada saat-saat awal perencanaan pembangunan berkisar pada persoalan apakah prioritas diberikan untuk pengembangan pertanian atau pengembangan industri. Untuk negara-negara yang bergantung pada pertanian tradisional yang dengan produktivitasnya rendah, haruskah prioritas diberikan untuk mengembangkan sektor industri modern yang efisien agar ekonominya menjadi dinamis dan bekenaan; atau haruskah pertanian diubah dahulu dan setelah berubah akan dapat menunjang proses industrialisasi?. Dalam kaitan ini, Forbes (1986: 65) mengemukakan, ilmu ekonomi yang muncul dalam tahun 1950-an dan tahun 1960-an pada dasarnya memusatkan perhatian pada kebutuhan untuk memindahkan negara-negara dengan basis pertanian yang rendah produktivitasnya ke basis industri yang tinggi produktivitasnya. Kemudian dijelaskan bahwa salah satu teori yang berusaha mewujudkan perpindahan/transisi ini secara efektif suatu pembangunan yang berangsur-angsur, non revolusioner yang didasarkan pada suatu keyakinan terhadap kemajuan, rasionalitas dan mekanisasi atau industrialisasi. Diantara contoh-contoh yang aling menonjol dari teori modernisasi difusionis ini adalah model “pusat pinggir” (*core-periphery*) dari Pebrisch (1949) yang dikembangkan kemudian oleh

Friedman (1969) menjadi “teori pembangunan regional”; konsep “kutub pertumbuhan” (*growth poles*) dari Perroyx (1950) dan “pusat pertumbuhan” (*growth centres*) dari Boudeville; serta geografi dari madzhab modernisasi yang dipimpin oleh Soja (1968), Gould (1970), Ridel (1970) dan Berry (1972). Penekanan teori ini adalah pada “ difusi pertumbuhan spasial “ yang mengahsilkn inovasi diseluruh ruang perekonomian dari pangkalan terdepan semula.

Dilihat dari tingkat-tingkat pengembangan antara daerah di pedalaman ( perdesaan ) serta di daerah perkotaan antar kawasan dalam suatu negara, terdapat beberapa ketidak seimbangan atau banyak terjadi ketimpangan. Banyak perencanaan yang pada mulanya tidak bersifat keruangan dan tidak memperhitungkan lokasi pengembangan yang menjadi sasaran proyek. Tanpa penendalian atau kepedulian pada aspek-aspek keruangan, proyek-proyek baru cenderung terletak di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang paling menarik dan banyak menguntungkan. Keadaan ini akan meningkatkan atau mengintensifkan pola *inti-pinggiran* (*core-periphery*), dalam suatu negara, sehingga keuntungan pembangunan cenderung terpusat pada suatu “ wilayah “ dari pada menyebar.

Adapun wilayah yang dimaksudkan disini adalah perdesaan dan perkotaan yang merupakan bagian dari wilayah karena wilayah terjadi atas perdesaan dan kota (Jayadinata, 1992: 169). Dengan demikian ada wilayah perdesaan (*rural region*) dan perkotaan (*urban region*) yang maing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Batasan ini sejalan dengan pengertian wilayah menurut Suhardjo (1995: 11), bahwa wilayah dapat diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang mempunyai keseragaman atas dasar ciri-ciri tertentu, baik yang bersifat fisik maupun sosial; misalnya iklim, topografi, jenis tanah, kebudayaan, bahasa ras dan sebagainya. Selanjutnya dijelaskan bahwa ukuran dari suatu wilayah sangatlah luwes, dapat hanya merupakan satu dusun ataupun satu rukun tetangga hingga meliputi wilayah yang merupakan suatu benua, bahkan gabungan dari benua.

Berasarkan pemikiran diatas, maka pembahasan berikut akan mengetengahkan bagaimana konsep keruangan dapat diaplikasikan dalam strategi perencanaan pembangunan regional. Untuk mendasari pemahaman tentang konsep variasi keruangan didalam pembangunan, akan diawali dengan uraian mengenai dua konsep utama yakni konsep *core-periphery* dan *Growth poles – Growth centres* serta uraian mengenai ketimpangan regional.

## **B. VARIASI KERUANGAN DAN KETIMPANGAN REGIONAL**

## 1. Konsep Variasi Keruangan

Variasi keruangan didalam pembangunan, menyangkut dua konsep utama, yaitu konsep pusat – pinggiran ( *core-periphery* ) dan konsep kutub pertumbuhan-pusat pertumbuhan ( *Growth pole-Growth centres* ), yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut : (Henderink & Murtomo, 1988: 26).

### a. Konsep pusat pinggiran ( *Core-periphery* )

Konsep pusat pinggiran ini pertama-tama dikemukakan pada tahun 1949 oleh Pebrisch, seorang ahli ekonomi Amerika Latin. Tipe teori pembangunan ini mencoba memberikan gambaran dan menerangkan tentang perbedaan pembangunan ( *development* ), tetapi penekanannya dari aspek keruangan. Jadi konsep ini sesuai dengan kajian geografi yang juga melihat sesuatu dari segi keruangan. Perbedaan antara daerah pusat ( C ) dan daerah pinggiran ( P ) dapat dijumpai dalam beberapa skala: di dalam region, antar regions dan antardaerah ( pelabuhan dan daerah pendukungnya: kota dan desa; negara maju dan negara sedang berkembang ).

Dari konsep ini kemudian berkembang menjadi beberapa pandangan teoritis mengenai perbedaan pembangunan yaitu kemajuan antardaerah pusat dan pinggiran ( *Core-periphery* ), seperti teori polarisasi ekonomi dari Myrdal dan Hirschman, teori pembangunan regional dan Friedmann dan pandangan Marxist.

Menurut Myrdal “ *Core region* “ adalah sebagai magnet yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya, karena adanya sebab-sebab kumulatif ke arah perkembangan ( “ *Cumulative upward causation* ” ): seperti arus buruh dari pinggiran ke pusat ( P ke C ); tenaga trampil, modal dan barang-barang perdagangan yang secara spontan berkembang didalam ekonomi pasar bebas untuk menunjang pertumbuhan di suatu lokasi (wilayah ) tertentu.

### b. Konsep kutub-kutub pertumbuhan dan Pusat-pusat pertumbuhan ( *Growth poles dan growth centres* ).

Konsep kutub pertumbuhan diformulasikan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi bangsa perancis pada tahun 1950. Kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat kekuatan – kekuatan sentrifugal ( *memencar* )

dan kekuatan sentripetal tertarik kearah situ. Growth poles bukan kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis (fima industri) dan hubungan kegiatan ekonomi yang dinamis demikian, tercipta didalam dan diantara sektor-sektor ekonomi.

Sedangkan konsep pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Boudeville, seorang ahli ekonomi Perancis. Ia menggunakan konsep kutub pertumbuhan yang sudah ada, dijadikan konsep keruangan yang kongkrit. Pusat pertumbuhan adalah sekumpulan (geografis) semua kegiatan. Pusat pertumbuhan adalah kota-kota atau wilayah perkotaan yang memiliki suatu industri "*propulsive*" yang kompleks. *Propulsive industries* adalah industri yang mempunyai pengaruh besar ( baik langsung maupun tidak langsung) terhadap semua kegiatan lainnya.

## **2. Ketimpangan/Masalah Regional**

Pertumbuhan geografi modern dimulai dalam pereode pasca perang dengan fokus pada diferensiasi wilayah (*areal defferentition*). Richard Hartshone dalam bukunya "*The Nature of Geography*" (1949), mendefinisikan *areal defferentiation* sebagai perbedaan yang tedapat diberbagai wilayah di permukaan bumi. Hartshone merupakan penganjur terkemuka yang memusatkan perhatian kepada diferensiasi wilayah dan menunjuk diferensiasi wilayah sebagai obyek studi geografi yang fundamental (Daldjoeni, 1991: 156).

Sementara itu, Forbes (1986: 57) mengemukakan bahwa, selama seperempat abad setelah tahun 1945, sejumlah besar tulisan geografi regional mengenai dunia bukan barat diterbitkan. Misalnya geografi regional mengenai India, Pakistan dan Asia Tenggara. Demikian pula didirikannya universitas-universitas baru di daerah bekas jajahan setelah perang, berkaitan dengan meluasnya risert mengenai geografi regional. Kedua gejala tersebut sekaligus merupakan reaksi terhadap kecenderungan munculnya masalah-masala/ketimpangan regional di berbagai belahan dunia bukan barat.

Pada bagian lain dikemukakan bahwa masalah regional telah membuka arena bagi perdebatan besar dikalangan ahli geografi kontemporer, perencana regional, ilmu regional dan ilmu sosial pada umumnya. Terhadap masalah ini terdapat *tiga pendekatan uatama*, yakni:

- a. pendekatan marginalis, yang menekankan pentingnya alokasi sumber-sumber daya melalui pasar dan memandang ketimpangan regional sebagai suatu gejala transisi.
- b. Pendekatan institusionalis yang berdasar pada prinsip “penyebab sirkuler dan kumulatif”. Penekatan ini mengakui kecenderungan kearah ketimpangan spasial dalam jalannya pasar kapitalis. Dalam kaitan ini, Stilwell (1978) seperti dikutip Forbes (1986) menjelaskan bahwa sekali ketimpangan regional berkembang, jalannya pasar dan migrasi modal serta buruh khususnya cenderung tidak mengurangi ketimpangan. Sebaliknya dari ramalan umum ilmu ekonomi neoklasik, setiap kecenderungan kearah ketimpangan regional, diatasi oleh kecenderungan tandingan yang kuat kearah ketimpangan.
- c. Pendekatan difusionis, untuk menahan kecenderungan kearah ketimpangan regional, intervensi pemerintah dianggap perlu sebagai mana pandangan penulis-penulis utama mengenai isu ini, termasuk Hirshman (1958), Myrdal (1957), Peroux (1950) dan Friedman (1966). Pandangan ini dilukiskan dengan geografi modernisasi atau teori modernisasi difusionis dengan berbagai model/konsep seperti telah diuraikan dibagian pendahuluan.

### **C. STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL DALAM KAJIAN VARIASI KERUANGAN.**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa teori modernisasi berusaha mewujudkan perpindahan/transisi negara-negara dengan basis pertanian kebasis industri. Teori pembagian kerja secara internasional pada dasarnya menyatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Akibat teori ini terjadilah spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara. Oleh karena itu secara umum di dunia ini terdapat dua kelompok negara, yakni negara yang memproduksi hasil-hasil pertanian dan negara-negara yang memproduksi barang-barang industri. Antara kedua kelompok negara ini terjadi hubungan dagang yang harapannya saling menguntungkan (Budiman, 1995: 16-17).

Hymmer berusaha mengembangkan pola ini dengan hukum perkembangan yang timpang, seraya mengemukakan bahwa pembagian kerja internasional yang baru melalui perusahaan-perusahaan transnasional, menciptakan *hubungan atasan/ bawahan yang herarkhi antara pusat dan pinggiran*. Perluasan perusahaan kearah pinggiran dapat menciptakan industri yang berorientasi pada ekspor, tetapi bukan pada bentuk perkembangan yang diusahakan oleh perencana.

Sehubungan dengan perencanaan pembangunan wilayah, Dusseldorp menwarkan dua cara dari atas kebawah (*top down approach*) yaitu perencanaan nasional memberikan petunjuk berapa besar keuangan yang disediakan untuk daerah; kemudian dilakukan dari bawah keatas (*botton up approuch*) yang dimulai dari perencanaan wilayah taraf terendah dan berakhir dengan perencanaan nasioal.

Untuk perencanaan wilayah secara keseluruhan (*regional planning*) tersebut dapat digunakan beberapa metode seperti:

1. Pengembangan wialayah secara admisitratif atau secara geografis dengan mengembangkan seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan, misalnya pengembangan daerah Jawa Barat atau pengembangan wilayah geografis Jawa Barat (terdiri atas Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta).
2. Pengembangan wilayah aliran sungai yang pengembangannya dilakukan di wilayah aliran sungai tertentu, seperti yang telah dilakukan oleh Tennessee Valey Authority di wilayah Sungai Tennessee di Amerika Serikat, dimana telah dibangun beberapa bendungan. Diwilayah aliran sungain tersebut dilakukan peningkatan pemanfaatan sungai, tanah dan sumberdaya alam lainnya. Dengan demikian dapat dikembangkan pertanian dan peternakan, kehutanan, industri, perikanan, pelayanan dan sebagainya. Dalam pengembangan tersebut digunakan pendekatan teritorial.
3. Pengembangan wilayah perdesaan yang dilakukan dengan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk dengan mengembangkan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk. Hal itupun menggunakan pendekatan teritorial. Pembangunan desa yang baru (diluar Jawa) dilakukan dengan transmigrasi, permukiman kembali dan perkebunan inti rakyat (PIR); sedangkan pembangunan desa lama ( diseluruh Indosnesia ) dilakukan dengan sistem unit daerah kerja pembangunan (UDKP), pendekatan ekologi, desa terpadu dan sebagainya.

4. Pengembangan wilayah menurut sistem perkotaan yang termasuk perencanaan wilayah fungsional serta mempunyai hubungan dalam ruang (*spasial*) atau hubungan difusi yang meliputi dua konsep berikut:

Konsep “*kutub pertumbuhan*” (*growth pole*), yang terpusat dan mengambil tempat (kota) tertentu sebagai pusat pengembangan yang diharapkan menjalarkan perkembangan kepusat-pusat yang tingkatannya lebih rendah. Dalam konsep ini terdapat istilah *spread dan trickling down* (penjalaran dan penetesan) serta *backwash dan polarization* (penarikan dan pemusatan). Konsep ini dimulai oleh Perroux (1950), berasal dari pengembangan industri untuk meningkatkan *Grose National Product* (GNP) setelah kemunduran ekonomi setelah perang Dunia II. Sesuai dengan konsep ini, investasi diberikan kepada kota besar, dengan pendirian bahwa jika kegiatan terkonsentrasi dalam suatu ruang, maka konsentrasi itu menimbulkan “*external economic*” yang mengakibatkan bertambahnya kegiatan baru pada kawasan kota tersebut.

Proses ini mempertinggi aglomerasi ekonomi. Semakain besar konsentrasinya itu, makin banyak penduduk, makin banyak kegiatan yang dilakukan dan makin banyak barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kota tersebut. Gejala inilah yang memberikan semua penjalaran atau penetesan dan penarikan atau pemusatan. (Jayadinata, 1992: 177-178).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut Forbes (1986: 36) bahwa konsep “*kutub pertumbuhan*” merupakan konsep berpengaruh satu-satunya mengenai “*pembangunan regional*” selama tahun 1960-an dan 1970-an. Konsep ini semula dikaitkan dengan karya Perroux (1950, 1971), yang perhatian utamanya adalah interaksi diantara sektor-sektor industri. Dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tercipta melalui serangkaian sektor atau kutub-kutub yang dominan dalam perekonomian. Boudeville (1966) membantu menerapkan konsep kutub pertumbuhan ini pada ruang geografi dengan jalan mana kutub-kutub itu menjadi dikenal sebagai pusat-pusat pertumbuhan (*growth centres*). Kutub-kutub pertumbuhan ini menjadi rangkaian kegiatan yang berlokasi di sekitar kegiatan penggerak yang orisinal. Pembangunan spasial dan pembangunan ekonomi menjadi terpusat pada suatu strategi pertumbuhan kota.



Menurut Dickenson, dkk (1992: 9) gagasan-gagasan Perroux tentang konsep kutub pertumbuhan, secara antusias diterima bukan karena ia tampak mempunyai *implikasi-implikasi keruangan*: pengembangan akan menyebar dari *kutub-kutub pengembangan ke tempat-tempat lainnya*. Namun Perroux sendiri tertarik perhatiannya pertama-tama pada suatu ekonomi dalam hal yang abstrak, yang hanya menyarankan bahwa pertumbuhan dapat dirangsang tanpa memandang dimana kemungkinan itu akan terjadi. Sejak dulu juga telah diketahui bahwa kemajuan ekonomi tidak dapat dicapai dengan tingkat yang sama disetiap tempat.

Myrdal dan Hirschman dengan teori polarisasi ekonominya telah mengetahui adanya daya kompensasi yang berlawanan, yakni *efek-efek arus balik atau polarisasi*, yang akan menghambat perkembangan diseluruh negeri. Hirschman melihat bahwa secara geografis pertumbuhan mungkin tidak perlu berimbang. Ia percaya bahwa dengan berlangsungnya waktu, efek-efek menetes kebawah (*trickling down-effects*) akan dapat mengatasi efek polarisasi; dan hal yang demikian akan terjadi jika ada campur tangan negara (pemerintah) dalam perekonomian. Gagasan-gagasan tersebut diatas memberikan dasar bagi tumbuhnya model pusat-pinggiran (*core-periphery*) dari pebrisch seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Myrdal dan Hirschman dengan teori polarisasi ekonomi menjelaskan perbedaan pembangunan/kemajuan antara *core dan periphery* (pusat-pinggiran). Menurut Myrdal, bila dalam suatu wilayah didirikan industri, maka akan terjadi pemusatan penduduk disekitar daerah industri tersebut. Penduduk disini memerlukan pelayanan sosial dan ekonomi, sehingga menarik para penanam modal. Akhirnya modalpun mengalir kearah itu. Industri pertama mungkin juga menarik pendirian industri lainnya baik yang menyediakan bahan mentahnya maupun industri yang mengolah bahan setengah jadi bahan yang dihasilkan oleh industri pertama. Demikianlah akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat (*Polarization of Growth*).

“*Polarization of growth*” ini akan menimbulkan “*backwash-effects*” atau akibat-akibat yang menghambat pertumbuhan wilayah-wilayah lain dari mana tenaga-tenaga trampil, modal barang-barang perdagangan ditarik kearah itu. Daerah yang terkena “*backwash-effects*” ini makin lama menjadi makin mundur dan disebut “*periphery*” (Henderink & Murতোমো, 1988: 26).

Sehubungan dengan pandangan tentang polarisasi pertumbuhan ekonomi tersebut, Friedman (Dickenson, dkk. 1992: 20), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terjadi dalam matriks kawasan-kawasan perkotaan, melalui matriks inilah perkembangan ekonomi keruangan diorganisasikan. Penentuan-penentuan lokasi perusahaan, dilakukan dengan mengacu pada kota-kota atau kawasan-kawasan urban. Maka kota-kota merupakan inti kemajuan ekonomi, disekitarnya terdapat wilayah pertanian yang lebih efisien dan di luar lagi terdapat aktivitas-aktivitas mata pencaharian hidup yang kurang maju.

Dengan demikian kota dan kawasan kota diidentifikasi sebagai katalisator suatu proses yang didesain untuk melibatkan keseluruhan ruang secara nasional. Kutub-kutub pengembangan primer yang terdiri dari industri-industri terkait yang diidentifikasi dan didorong perkembangannya dengan suatu jaringan komunikasi. Bantuan akan disalurkan kepada tingkatan pusat-pusat yang lebih kecil. Daya pengaruh pertumbuhan memusat, perkembangan industri akan menghasilkan suatu aliran investasi yang “menetes ke bawah” melalui hirarki cabang-cabang ekonomi dan keruangan hingga sampai pada pusat-pusat urban yang lebih kecil pun akan menerima keuntungan-keuntungannya.

Friedmann sebagai ahli perencanaan yang mengembangkan teori pembangunan regional, menggunakan konsep *core-periphery* untuk membuat tipologi suatu wilayah yakni:

- a. “*core-regions*”, sebagai ekonomi metropolitan yang terpusat. Ini identik dengan kapitalis modern. Sebagai contoh *core-regions* ini adalah wilayah perkotaan Jakarta, Indonesia; tetapi dapat pula dengan skala internasional.
- b. Wilayah transisi yang berkembang (“*upward-transition region*”), yaitu wilayah dekat dengan pusat dan sesuai untuk pengembangan sumber-sumber (misalnya antara daerah perkotaan Jakarta dengan daerah perkotaan Bandung).
- c. Wilayah yang berdekatan dengan sumber-sumber (“*resource-frontier regions*”), daerah pinggiran pemukiman baru (misalnya daerah-daerah transmigrasi di Sumatra, Kalimantan dan lain-lainnya).
- d. Wilayah transisi yang mundur (“*downward-transition regions*”), wilayah ini terdapat di dalam negara (misalnya daerah-daerah yang mengalami “*back wash*”).

*effect*”) dan di luar negeri pada skala dunia (misalnya “*sub-Saharan countries*”) (Hiderink & Murtomo, 1988:27).

Konsep Agropolitan dengan menggunakan prinsip desentralisasi dan mengikut sertakan sebagian besar penduduk wilayah, yaitu penduduk pedesaan yang bertani dalam pembangunan. Sesuai konsep ini, pedesaan yang tadinya tertutup, diusahakan supaya lebih terbuka. Misalnya dengan menyebarkan berbagai industri kecil di wilayah pedesaan dan pengembangan rekreasi, diharapkan terjadi di kota di wilayah pertanian (*agropolis*). Akibatnya penduduk pedesaan dapat meningkatkan pendapatannya serta mendapatkan sarana sosial ekonomi dalam jangkauannya, dan dengan demikian perpindahan ke kota dapat dikendalikan.

#### **D. PENUTUP**

Pembangunan regional merupakan fokus penting dari geografi pembangunan selama periode pasca perang, suatu kecenderungan yang erat kaitannya dengan dimasukkannya sasaran perencanaan regional dalam rencana lima tahun dari banyak masyarakat pinggiran sejak tahun 1960-an.

Teori modernisasi difusionis dengan adanya beberapa model/konsep seperti model “*pusat-pinggiran*” (*core-periphery*) dari Prebisch/Friedmann; konsep “*kutub-kutub pertumbuhan dan pusat-pusat pertumbuhan*” dari Perroux/Boudeville, hanyalah salah satu dari beberapa arus pemikiran difusionis yang ditempuh oleh para ahli geografi pembangunan. Namun jika ditinjau kembali, barangkali itu yang penting. Secara ringkas argumen yang didkemukakan menyatakan bahwa, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang kurang berkembang pada akhirnya akan tercapai melalui transmisi dorongan-dorongan pertumbuhan dari kawasan-kawasan yang lebih maju. Dengan demikian meningkatnya interaksi dan integrasi antara daerah-daerah yang kurang maju dan lebih maju pada tingkat tertentu, akan menjurus kepada awal perkembangan di daerah-daerah yang disebut pertama.

Konsep/model pembangunan teori modernisasi difusionis seperti dijelaskan sebelumnya, menekankan kepada dua dimensi. Dalam satu dimensi, konsep/model tersebut menekankan masalah organisasi spasial. Target pokok dimensi ini adalah negara-negara pasca kolonial yang baru mengadakan industrialisasi atau wilayah-wilayah yang

kurang berkembang (misalnya wilayah pedesaan). Disini perencanaan regional dikaitkan dengan pembangunan bangsa, perencanaan pusat, dan integrasi spasial perekonomian nasional. Dimensi kedua menaruh perhatian pada masalah kawasan-kawasan terbelakang dalam negara-negara industri maju.

Oleh karena itu di kebanyakan negara-negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) strategi pembangunan mengandalkan pada pendekatan *Growth-Centres* (pusat-pusat pertumbuhan) dan meletakkan industri sebagai "*leading sector*" (sektor unggul). Dengan memusatkan industri di pusat pertumbuhan, maka diharapkan strategi itu mampu memecahkan masalah keterbelakangan dan kemiskinan dan pedesaan. Secara teoritis diyakini bahwa daerah pinggiran (*periphery*) akan berkembang melalui efek menyebar (*spread effect*) atau efek tetesan ke bawah (*trickle down-effect*) dari pusat-pusat pertumbuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto R. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiman Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia III*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daldjoeni N. 1991. *Pengantar Geografi*. Bandung: Alumni.
- Dickenson, J. P. 1992. *Geografi Negara Berkembang*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Forbes, Dean K. 1989. *Geografi Keterbelakangan, Sebuah Survey Kritis*. Jakarta: LP3ES.
- Henderink, J & Murtomo R. 1988. *Konsep dan Teori Pembangunan, Nr XII*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Jaya Appalray & Safier M. 1976. *Growth Centre Strategies in Less-Developed Countries: in A. Gilbert (ed): Development Planning Spatiel Structure*. London.
- Jayadinata, J. T. 1992. *Tataguna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Mabogunye, A. C. 1978. *Growth Poles and Growth Centre in Regional Development of Nigeria, in A. Kuklinshi; Regional Policies in Nigeria, India, and Brazil*. The Hague. P. 5-11.
- Suhardjo, A. J.. 1995. *Konsep-Konsep Dasar Dalam Geografi*. Yogyakarta: Fakultas Geografi PPS UGM.
- Weeler, J. O. & Muller, Peter, O. 1986. *Principles of Spatial Interaction*. Terjemahan J. Esomar (1992). Manado: FPIPS IKIP.